



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 135.01.2.692022/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 02
Tanggal : 21 Februari 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
- 3. Provinsi : (25) PAPUA
- 4. Kode/Nama Satker : (692022) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA
- Sebesar : Rp. 20.043.813.000 (DUA PULUH MILIAR EMPAT PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS TIGA BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 135.01.WA Program Dukungan Manajemen
- 135.01.WA. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Jumlah Uang

Rp. 20.043.813.000
Rp. 20.043.813.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 20.043.813.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN JAYAPURA (063) Rp. 20.043.813.000

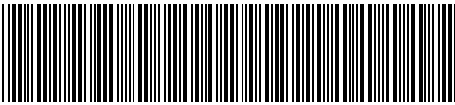
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692022/2025
I A. INFORMASI KINERJA



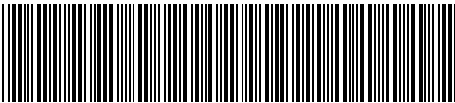
DS:0113-0792-1485-6666

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (692022) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

Halaman : I A. 1

Program	:	135.01.WA	Program Dukungan Manajemen				20.043.813.000
Kegiatan	:	7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum				20.043.813.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			8,00 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit 15.718.089.000
Rincian Output	:	01	EBA.001	Pengelolaan BMN Kantor Wilayah			2.00 Laporan 75.775.000
		02	EBA.002	Layanan Kerja Sama			1.00 Laporan 65.755.000
		03	EBA.956	Layanan BMN			1.00 Layanan 10.000.000
		04	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi			1.00 Layanan 255.068.000
		05	EBA.959	Layanan Protokoler			1.00 Layanan 440.080.000
		06	EBA.962	Layanan Umum			1.00 Layanan 298.096.000
		07	EBA.994	Layanan Perkantoran			1.00 Layanan 14.573.315.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			19,00 Unit, m2, Paket 3.216.209.000
Rincian Output	:	01	EBB.951	Layanan Sarana Internal			15.00 Unit 670.709.000
		02	EBB.971	Layanan Prasarana Internal			4.00 Unit 2.545.500.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal			62,00 Orang, Layanan, Rekomendasi 191.125.000
Rincian Output	:	01	EBC.001	Layanan Pengelolaan dan Pengadaan SDM			1.00 Layanan 20.350.000
		02	EBC.954	Layanan Manajemen SDM			61.00 Orang 170.775.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			15,00 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi 918.390.000
Rincian Output	:	01	EBD.001	Pengelolaan Perencanaan dan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah			2.00 Laporan 346.140.000
		02	EBD.002	Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah			3.00 Dokumen 23.400.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692022/2025
I A. INFORMASI KINERJA

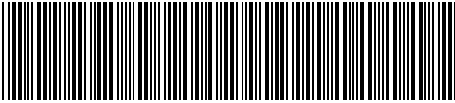


DS:0113-0792-1485-6666

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (692022) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

Layanan Manajemen Kinerja Internal			Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		
03	EBD.003	Koordinasi dan konsultasi Manajemen Keuangan	2.00	Laporan	189.450.000
04	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3.00	Laporan	36.400.000
05	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen	17.200.000
06	EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	3.00	Laporan	292.800.000
07	EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.00	Laporan	13.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692022/2025
I B. SUMBER DANA



DS:0113-0792-1485-6666

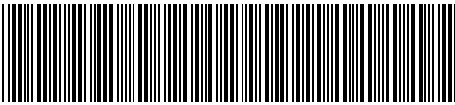
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (692022) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	20.043.813.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	20.043.813.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692022/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

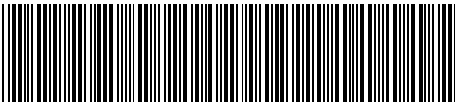


DS:0113-0792-1485-6666

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (692022) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692022	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA	9.236.495	7.591.109	3.216.209	-	-	20.043.813	25 . 51	
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen	9.236.495	7.591.109	3.216.209	-	-	20.043.813		
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	9.236.495	7.591.109	3.216.209	-	-	20.043.813		
7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	9.236.495	6.481.594	-	-	-	15.718.089		
01	RM	9.236.495	6.481.594	-	-	-	15.718.089		
7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	-	3.216.209	-	-	3.216.209		
01	RM	-	-	3.216.209	-	-	3.216.209		
7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	191.125	-	-	-	191.125		
01	RM	-	191.125	-	-	-	191.125		
7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	918.390	-	-	-	918.390	25 . 51	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692022/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:0113-0792-1485-6666

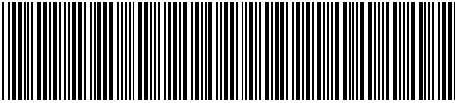
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (692022) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51] 3	BARANG [52] 4	MODAL [53] 5	BANTUAN SOSIAL [57] 6	LAIN-LAIN [58] 7	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	918.390	-	-	-	918.390	063@	
JUMLAH		9.236.495	7.591.109	3.216.209	-	-	20.043.813		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692022/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:0113-0792-1485-6666

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (692022) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

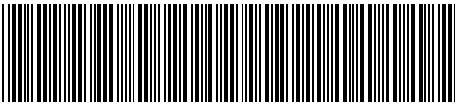
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692022	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	608.148	684.854	1.492.812	1.577.389	1.581.701	2.158.734	1.481.876	1.538.701	1.710.245	1.526.646	2.055.383	3.627.324	20.043.813
		BELANJA PEGAWAI	608.148	605.283	1.319.637	704.486	698.162	1.280.175	561.937	665.711	665.711	665.711	750.873	710.660	9.236.495
		BELANJA BARANG	0	79.571	173.175	614.539	619.845	614.866	609.297	609.297	780.841	597.242	1.040.817	1.851.618	7.591.109
		BELANJA MODAL	0	0	0	258.363	263.693	263.693	310.642	263.693	263.693	263.693	263.693	1.065.046	3.216.209
		Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	608.148	684.854	1.492.812	1.577.389	1.581.701	2.158.734	1.481.876	1.538.701	1.710.245	1.526.646	2.055.383	3.627.324	20.043.813
		51 BELANJA PEGAWAI	608.148	605.283	1.319.637	704.486	698.162	1.280.175	561.937	665.711	665.711	665.711	750.873	710.660	9.236.495
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	79.571	173.175	614.539	619.845	614.866	609.297	609.297	780.841	597.242	1.040.817	1.851.618	7.591.109
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	258.363	263.693	263.693	310.642	263.693	263.693	263.693	263.693	1.065.046	3.216.209

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692022/2025
IV A. B L O K I R



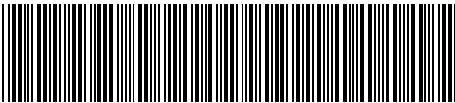
DS:0113-0792-1485-6666

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [692022] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692022	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.060.711
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 5.311.073		Efisiensi Belanja K/L TA 2025
	52 Belanja Barang Rp. 2.094.864		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	53 Belanja Modal Rp. 3.216.209		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen	7099.EBB	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.988
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM)		Layanan Sarana dan Prasarana Internal
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 45.773		532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM)
	Efisiensi Belanja K/L Tahun 2025		Catatan Pengadaan Perangkat Pengolah Data berjumlah 2 Unit senilai Rp. 496.382.000
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 670.709
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		Efisiensi Belanja K/L TA 2025
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.944		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Catatan Rehabilitasi Rumah Dinas Kakanwil Tipe B 1 unit dan Rumah Dinas Kepala Divisi Yankumham, Kepala Divisi Pemasyarakatan, dan Kepala Divisi Keimigrasian Tipe C 3 Unit senilai Rp. 2.545.500.000
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)	7099.EBC	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.545.500
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 101.262		Efisiensi Belanja K/L TA 2025
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Layanan Manajemen SDM Internal
	522141 Belanja Sewa(RM)		521211 Belanja Bahan(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.104		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 28.350
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		Efisiensi Belanja K/L TA 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)		521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 64.376		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 26.400
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		Efisiensi Belanja K/L TA 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692022/2025
IV A. B L O K I R



DS:0113-0792-1485-6666

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [692022] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

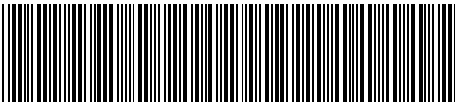
Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
7099.EBD	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.440 Efisiensi Belanja K/L TA 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 73.640 Efisiensi Belanja K/L TA 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 48.256 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.350 Efisiensi Belanja K/L TA 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 136.400 Efisiensi Belanja K/L Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.480 Efisiensi Belanja K/L Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 438.840 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.550 Efisiensi Belanja K/L Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692022/2025
IV B. C A T A T A N



DS:0113-0792-1485-6666

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [692022] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692022	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA		
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen		
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum		
7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp. 3.216.209		
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	* Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 3 1 unit Rp. 51.827		
	* Pengadaan Perangkat Pengolah Data berjumlah 2 Unit senilai Rp. 496.382.000 Rp. 496.382		
	* Pengadaan Fasilitas Perkantoran Berjumlah 11 Unit Senilai Rp. 122.500.000 Rp. 122.500		
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan		
	* Rehabilitasi Rumah Dinas Kakanwil Tipe B 1 unit dan Rumah Dinas Kepala Divisi Yankumham, Kepala Divisi Pemasarakatan, dan Kepala Divisi Keimigrasian Tipe C 3 Unit senilai Rp. 2.545.500.000 Rp. 2.545.500		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA